

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI NARENDRA MODI DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KEAMANAN ENERGI DI INDIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

USI ALFIANI NUR

4518023046

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI NARENDRA MODI DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KEAMANAN ENERGI DI INDIA

Usi Alfiani Nur

4518023046

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I



Rosnani, S.IP., M.A.

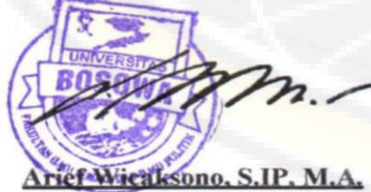
Pembimbing II



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

Mengetahui :

FISIP Universitas Bosowa


Arief Wicaksono, S.IP., M.A.

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa


Zulkhair Burhan, S. IP., M.A.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 19 Juli Tahun 2022 Skripsi dengan Judul
**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI NARENDRA MODI DALAM UPAYA
 MENINGKATKAN KEAMANAN ENERGI DI INDIA**

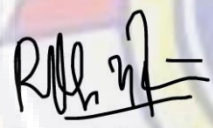
Nama : **USI ALFIANI NUR**
 Nomor Stambuk : **4518023046**
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
 Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Pengawas Umum :


Arief Wicaksono, S.IP.M.A

Panitia Ujian :


Rosnani, S.IP., M.A
 Ketua


Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
 Sekretaris

Tim Penguji :

1. Muh, Asy'ari, S.IP., M.A
2. Beche Bt. Mamma, S.IP., M.A
3. Rosnani, S.IP., M.A
4. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A


 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, yang dengan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Narendra Modi dalam Upaya Meningkatkan Keamanan Energi di India”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil kerja penulis dengan dukungan banyak pihak. Banyak diantara mereka sangat istimewa dalam hidup penulis, dan untuk itu penulis secara khusus hendak mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan pertolongan mereka selama ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, yaitu Ayahanda Mauwi, SKM., M.Kes dan Ibunda Nurhasanah A.Mk yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan terhadap segala aktivitas yang penulis tekuni dan minati selama di bangku perkuliahan, baik dalam bentuk materil maupun moril. Berkat bapak dan mama saya bisa mencapai titik ini. Terima kasih pula kepada adik – adik tercinta penulis Akram Fadilah M, Anas Fadlika Saputra M, dan Afrig Rizki Muttaqim yang telah memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis untuk semangat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan kuliah dengan caranya yang unik.

Terima kasih sudah jadi keluarga serta tempat pulang yang hangat bagi penulis.

2. Ibu Rosnani S.IP.,M.A dan bapak Zulkhair Burhan S.IP., M.A. Selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah bersedia memberi arahan dan masukan kepada penulis. Terimakasih atas kesediaan waktu dan tenaganya selama mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Rosnani S.IP., M.A selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang menjadi tempat meminta saran selama perkuliahan terlebih lagi selama menyelesaikan skripsi penulis. Terima kasih atas segala petuahnya yang akan selalu bermanfaat bagi penulis kedepannya.
4. Semua Bapak dan Ibu Dosen, Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., Bapak As'ari Mukrim, S.IP., M.A., Bapak Ahmad Tarikhul Haq, S.IP., M.A, Bapak M. Fahmi B. Fauzi, S.IP., MA., Ibu Fivi Elvira Basri, S.IP., M.A., Ibu Finaliyah Hasan, S.IP., M.A., Ibu Beche Bt. Mamma, S.IP., M.A., Ibu Noor Fahmi Pramuhi, S. IP., M.A., Ibu Ayu Kartika J. Tas'as, S.IP., M.A., Ibu Dina Magdalena Lungkang S.IP., M.A. Terima kasih telah berkenan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang sudah berkenan membantu segala proses administrasi penulis
6. Lembaga kemahasiswaan yang menjadi wadah penulis belajar dan mengembangkan diri, seperti HIMAHl (Himpunan Mahasiswa Ilmu

Hubungan Internasional), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Wangi - Wangi Makassar (HIPMAWANGI MAKASSAR).

7. Kepada sahabat – sahabatku, Amani Fajri Khairunnisa, Rezki Hardianti, dan Wa Ode Rahmayanti, yang sudah berkenan menjadi salah satu orang yang selalu mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini
8. Kepada teman – teman SMA saya (Fantastic Four) terutama yang berada di sektor Makassar, Nadia, Winda, Geby, Anfi, Liho, Yayong, Sona, Yuli, Aulia dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu persatu
9. Kepada orang tua angkat saya Om Ali & Tante Mila yang sudah menjadi sosok orang tua yang begitu luar biasa dan telah menjadi sosok penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini
10. Kepada Anak Baik Indonesia Sehat yang telah banyak membantu dan menemani penulis berjuang selama di bangku perkuliahan, yaitu Dhila, Dian, Teno, Dini, Hara, Emma, Victoria, Meysi, Vivi dan Tata, sudah menjadi orang – orang yang begitu luar biasa dalam proses perkuliahan
11. Anak HI angkatan 2018 khususnya kelas B, yang telah sama – sma berjuang dalam proses perkuliahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas – tugas.
12. Kepada Keluarga KKN Angkatan 51 Desa Sapanang, Kelurahan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yaitu Bapak Desa Sapanang, Bapak dan Ibu Staff Kelurahan, Umi dan Abi, Oma, Opa, Mama Athar, Jihan, Irma, Viera,

Aulia, Anggi, Lola, Fany, Ulfa, Nelcy, Dial, Riani, Fifit, Eni, Laras, Fuad, Rajadi, Oji, Mangadil dan Ito atas segala bantuan yang serta kerjasamanya dan juga atas dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

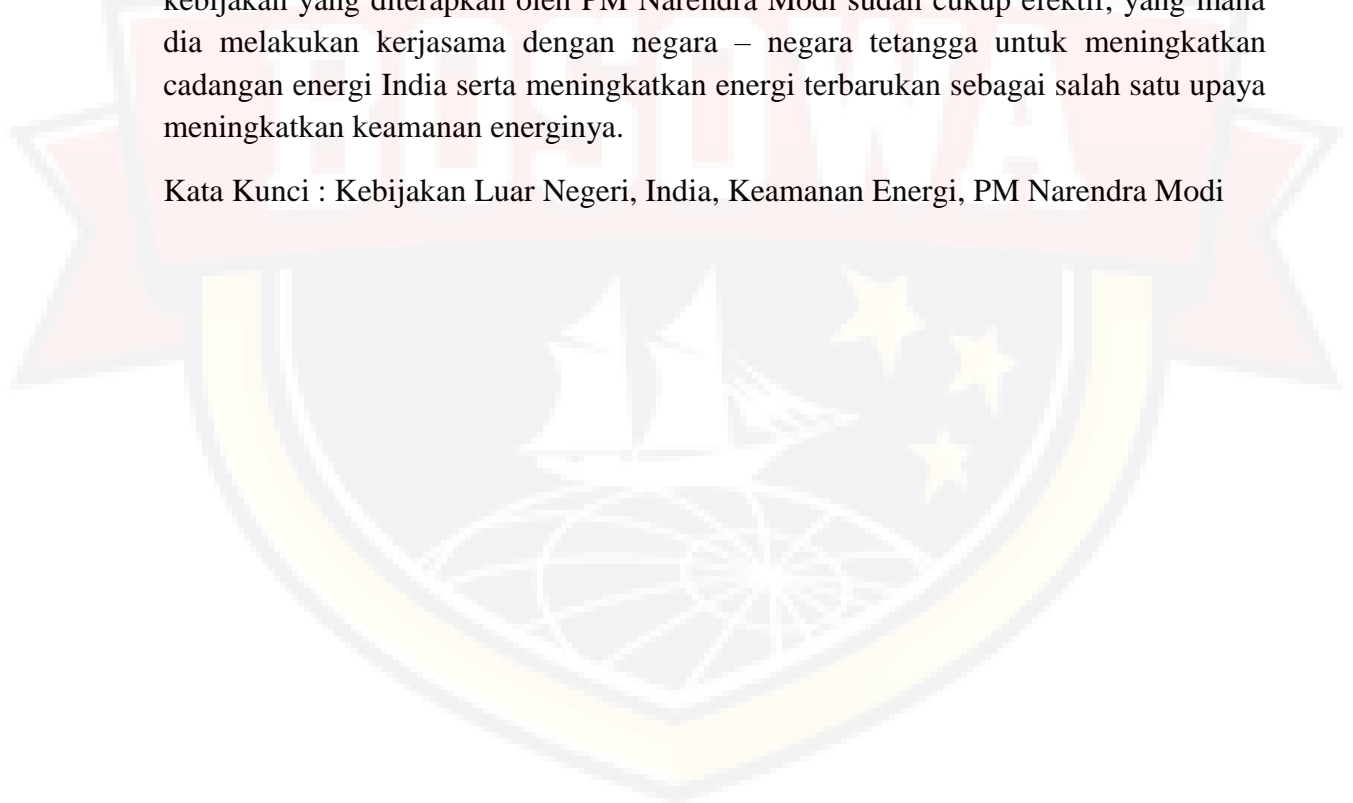
13. Kepada rumah hijau sudah menjadi tempat ternyaman untuk penulis dan menjadi markas bagi banyak orang



ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India. Masalah keamanan energi merupakan salah satu masalah yang krusial bagi negara – negara di seluruh dunia dikarenakan masalah ini terkait dengan kekurangan energi serta kelangkaan energi. Keamanan energi sangat erat kaitanya dengan peran negara sebagai aktor yang dapat mewujudkan rantai suplai energi yang terjamin. India dalam salah satu negara yang membutuhkan pasokan energi yang cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah telaah pustaka. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah kebijakan luar negeri dan politik luar negeri. Ada 4 indikator yang digunakan untuk melihat masalah keamanan energi di India melalui kebijakan luar negeri yang diterapkan PM Narendra Modi. Dari hasil temuan penulisan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh PM Narendra Modi sudah cukup efektif, yang mana dia melakukan kerjasama dengan negara – negara tetangga untuk meningkatkan cadangan energi India serta meningkatkan energi terbarukan sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanannya.

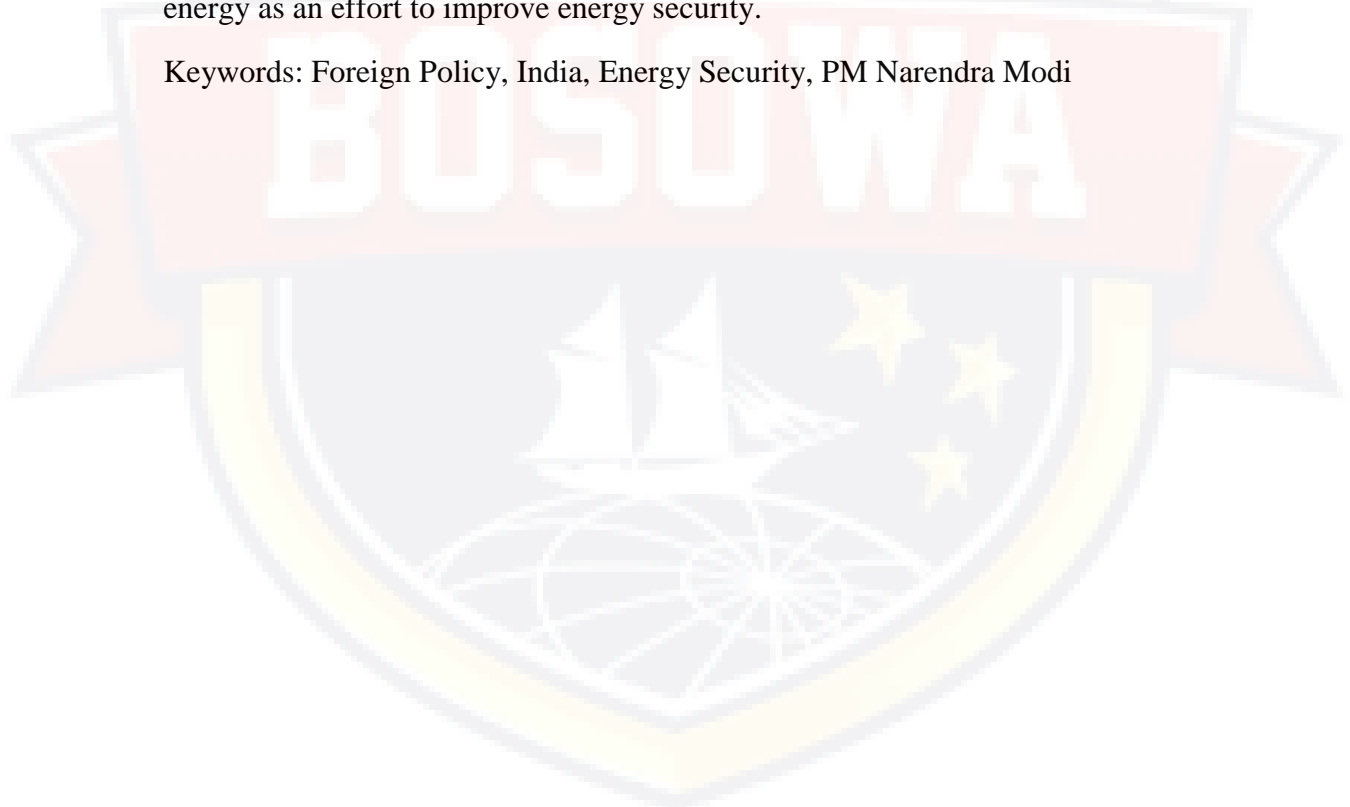
Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, India, Keamanan Energi, PM Narendra Modi



ABSTRACT

This thesis aims to analyze the foreign policy of Narendra Modi in an effort to improve energy security in India. The issue of energy security is one of the crucial problems for countries around the world because this problem is related to energy shortages and energy scarcity. Energy security is closely related to the role of the state as an actor who can create a guaranteed energy supply chain. India is one of the countries that requires a fairly high energy supply. The method used in this research is qualitative analysis and the technique used in data collection is literature review. In this study, the concepts used are foreign policy and energy security. There are 4 indicators that are used to see energy security issues in India through PM Narendra Modi's foreign policy. From the findings of the writing that the policies implemented by PM Narendra Modi have been quite effective, in which he collaborates with neighboring countries to increase India's energy reserves and increase renewable energy as an effort to improve energy security.

Keywords: Foreign Policy, India, Energy Security, PM Narendra Modi



DAFTAR ISI

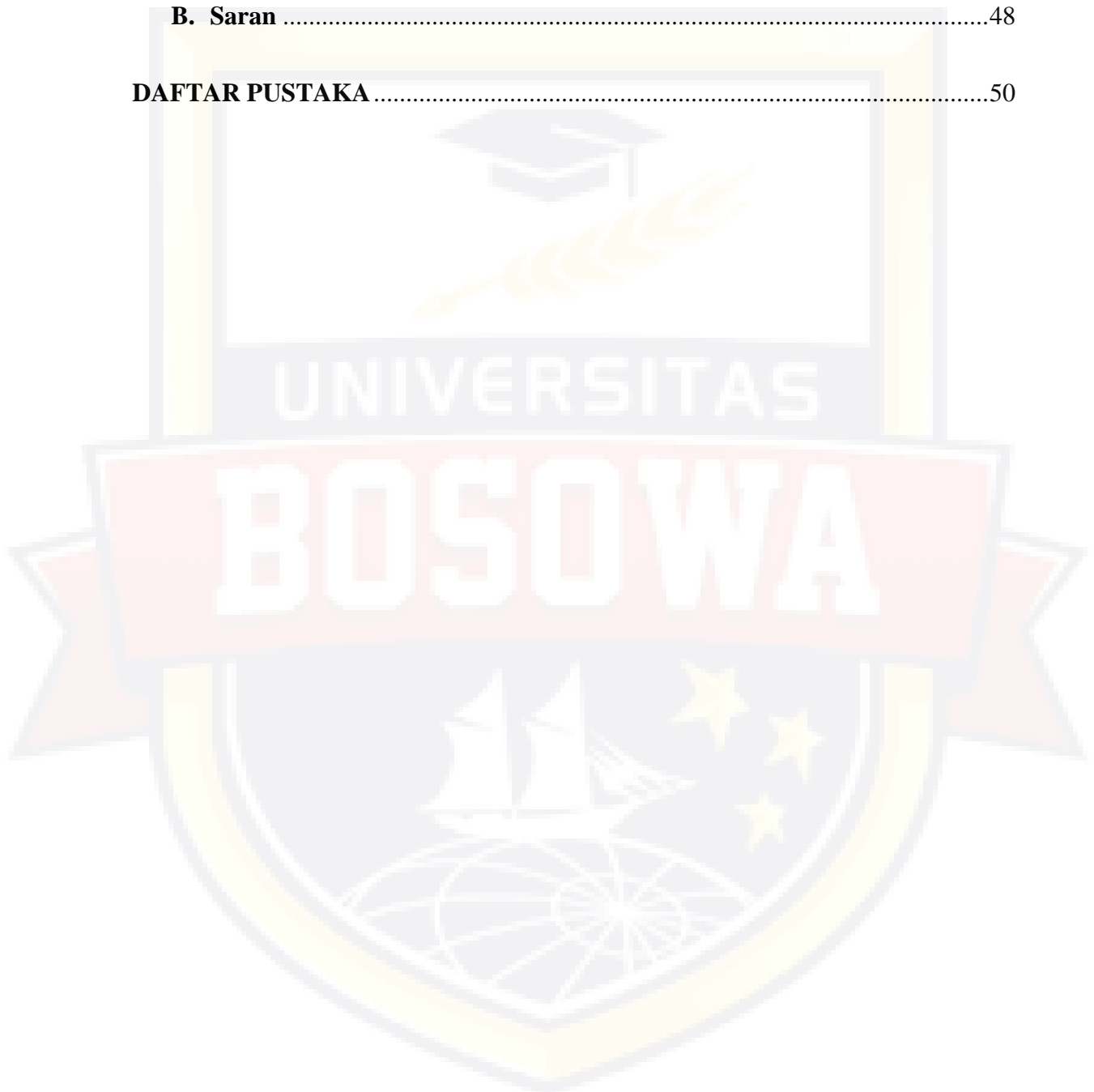
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
1. Batasan Masalah	8
2. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
1. Konsep Keamanan Energi.....	11
2. Konsep Politik Luar Negeri	12
E. Metode Penelitian	14

1. Tipe Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3. Teknik dan Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	16
F. Rancangan Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Konsep Keamanan Energi.....	18
B. Konsep Politik Luar Negeri.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM.....	25
A. Kebijakan Luar Negeri Perdana Menteri Narendra Modi.....	25
1. Kebijakan <i>Act East</i>	26
2. Kebijakan <i>Neighborhood First</i>	28
B. Kondisi Keamanan Energi di India.....	31
BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Keamanan Nasional.....	36
B. Kemajuan Ekonomi.....	38
C. Meningkatkan Kekuatan Nasional.....	40
D. Prestise Internasional.....	43
BAB V PENUTUP.....	47

A. Kesimpulan47

B. Saran48

DAFTAR PUSTAKA50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah energi menjadi salah satu masalah yang krusial bagi negara – negara di seluruh dunia, dikarenakan isu ini terkait dengan kekurangan atau kelangkaan energi saat ini serta meningkatnya kebutuhan negara – negara akibat meningkatnya industrialisasi, dan kepentingan militer setiap negara. Keberlanjutan energi nasional dan penggunaan energi alternatif memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan energi suatu negara. Keberadaan energi sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dalam kerangka negara, minyak dan gas bumi sangat penting untuk menghasilkan listrik yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan masyarakat seperti industri dan kegiatan lainnya. Keberadaan energi ini sangat penting sehingga pemblokiran akses akan berdampak negatif pada hampir semua kegiatan masyarakat.

Isu keamanan energi (*energy security*) menjadi salah satu agenda keamanan global dalam hubungan internasional. Hal ini bermula saat terjadinya krisis minyak secara global pada tahun 1970 – an, yang mana masyarakat internasional mulai menyadari pentingnya keamanan energi (*energy security*). Menurut *International Energy Agency* keamanan energi

ialah suatu keadaan dimana ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dan dengan harga yang terjangkau (IEA, 2019).

Dalam hal ini, energi merupakan motor penggerak bagi segala aktivitas kehidupan manusia mulai dari sektor perekonomian, rumah tangga, industri, transportasi, teknologi dan informasi, dan militer (Elkind, 2010, p. 1). Jenis energi yang diukur tidak hanya berfokus pada minyak, tetapi juga sumber energi lainnya. Adapun sumber energi yang dimaksud ialah gas alam, batu bara, nuklir, hidro, dan sumber energi terbarukan memainkan peran yang semakin penting dalam membentuk profil energi dunia.

Kebutuhan energi di dunia terus mengalami peningkatan. Menurut proyeksi International Energy Agency (IEA) bahwa sampai tahun 2030 nanti permintaan energi dunia akan mengalami peningkatan sebesar 45%, yang mana 80% kebutuhan energi di pasok dari bahan bakar fosil (Mineral, 2008). Selain dari itu, permintaan energi juga meningkat sebesar 1,3% setiap tahunnya hingga tahun 2040 (IEA, 2019, p. 23).

Ketersediaan energi akan menentukan produktivitas, kemajuan, dan kemakmuran suatu negara. Karena negara tanpa keamanan energi (*security energy*) tidak bisa menjadi kuat, maju, dan makmur. Dalam berbagai kesempatan, banyak kalangan kerap menyebut tiga hal yang kini semakin langka dan berpotensi memicu konflik di masa depan yaitu: suplai pangan,

suplai energi, dan suplai air. Hal ini menunjukkan betapa energi berperan dalam menggerakkan roda kehidupan suatu negara (Pradnyana, 2016, p. 68)

India sebagai salah satu negara berkembang membutuhkan pasokan energi yang cukup tinggi. Akan tetapi India menghadapi kekurangan energi dalam domestik, sehingga harus mengimpor kebutuhan energinya. Dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 7 persen dalam lima tahun terakhir (Laoli, 2019). India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat kebutuhan energi berbahan baku batu bara di India meningkat, yaitu 45,88%, minyak mentah 29,55%, gas bumi 6,17%, energi nuklir 1,09%, listrik tenaga air 3,91%, dan energi terbarukan 3,40% (BP, 2019). Pada tahun 2019, konsumsi energi primer di India tumbuh sebesar 2,3% dan merupakan negara dengan tingkat konsumen energi terbesar ketiga di dunia (Energy, 2021). Total permintaan energi primer diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2030.

Konsumsi energi India mengalami peningkatan sejak tahun 1980 – an sampai sekarang. Pada tahun 2018, India memiliki cadangan minyak mentah sebesar 594,49 juta ton (MT) (Government of India, 2018). India adalah konsumen energi dan minyak terbesar ketiga di dunia setelah China dan AS (Tiwary, 2022). Pada tahun 2019 konsumsi minyak India diperkirakan akan meningkat dari 4,8 juta barel per hari. Menurut *Energy Information Administration* (IEA) konsumsi minyak akan meningkat sebesar 7,2 mbd pada

tahun 2030 dan 9,2 mbd pada 2050. Selain itu juga permintaan minyak India akan meningkat 50 persen pada tahun 2030 nanti (Choudhary, 2021)

Konsumsi minyak dan tingkat produksi India yang relatif stabil membuat India semakin bergantung pada impor untuk mencukupi permintaan minyaknya. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diperdagangkan antar negara (Mas'ood. & Riza, 2005). Saat ini, India berada di peringkat kedelapan di antara negara – negara pengimpor terbesar dengan pangsa impor 2,8 persen dan akan menjadi importir terbesar keempat pada tahun 2030 (Mishra, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah menjadi pemasok utama India di belakang Arab Saudi, yang mana hampir tiga perempat impor minyak mentah India berasal dari Timur Tengah.

Ternyata selain minyak, gas alam juga menjadi saah satu energi yang sangat krusial di India. Pada tahun 2019 India memproduksi gas alam sejumlah 32 miliar meter kubik, dan pemerintah menargetkan produksi gas bumi lebih dari 34 miliar meter kubik pada tahun 2020 (Jaganmohan, 2021). Gas alam menjadi semakin signifikan di sektor listrik India, karena masalah lingkungan dan pasokan batu bara yang terbatas.

Permintaan gas alam didorong oleh sektor energi. Ketika negara – negara berusaha untuk mendiversifikasi sumber energi mereka dan memastikan keamanan energi secara keseluruhan, gas alam diharapkan menjadi komponen konsumsi energi yang semakin penting. Perlu diketahui

bahwasanya sebagian besar listrik di India dihasilkan dari sumber konvensional. India juga mengalami yang namanya kekurangan kapasitas listrik, yang mana total permintaan listrik domestik yang meningkat dan melebihi kapasitasnya, membuat situasi semakin sulit.

Selain itu, kelangkaan batu bara menghambat kemampuan menghasilkan energi. Batu bara merupakan sumber bahan bakar utama untuk pembangkit listrik, sekitar 70 persen listrik dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan dasar batu bara. Selain batu bara, minyak dan gas bumi, tenaga nuklir juga memainkan peran penting di India, pemerintah semakin mengandalkan pengembangannya untuk memenuhi target pembangkit listrik. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah mengenai masalah nuklir, pemerintah melaksanakan kerjasama di antaranya, kerjasama nuklir sipil antara India dan AS yang ditandatangani pada tahun 2005.

Pemerintah India bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pembangkit listrik dan meningkatkan kapasitas energi. Salah satunya mengenai proyek pembangkit listrik tenaga surya yang bertujuan untuk mengamankan pasokan energi domestiknya. Proyek ini bertujuan untuk memungkinkan penyebaran tenaga surya skala besar baik yang terhubung ke jaringan maupun di luar jaringan, serta penyediaan layanan energi komersial yang terdesentralisasi. Misi tenaga surya nasional ini sangat berperan penting terhadap penurunan emisi karbon.

Melihat kondisi India tersebut, terlebih ketergantungan India terhadap penggunaan dan impor minyak dari negara lain, menunjukkan bahwa India mengalami kerentanan energi. Hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman akan keamanan energi oleh pemerintah India dan kondisi yang menjadi batasan aman bagi India. Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah mulai fokus pada kebijakan keamanan energi untuk mendorong ekonominya dan meningkatkan standar hidup rakyatnya. Pada akhir 1990 – an atau lebih tepatnya, selama pemerintahan Perdana Menteri (PM) Partai Bharatiya Janata (BJP) atau *National Democratic Alliance* (NDA) yang dipimpin oleh Atal Bihari Vajpayee, keamanan energi mulai muncul sebagai prioritas kebijakan bagi India di tingkat kebijakan dalam dan luar negeri, yang mana pada tahun sebelumnya ketahanan energi (*energy security*) tidak menjadi pusat prioritas kebijakan India (Sharma, A : 2019).

Sehingga pada fase setelah Atal Bihari Vajpayee, yang di pimpin oleh PM Manmohan Singh keamanan energi terus berlanjut sebagai salah satu prioritas kebijakan. PM Singh menekankan ketahanan energi sebagai masalah yang paling penting penting, kedua setelah ketahanan pangan

Pada saat kepemimpinan Narendra Modi, dia mengambil langkah – langkah untuk menghidupkan kembali ekonomi India dan mengatasi tantangan pembangunan India. Menyadari akan hubungan langsung antara ketahanan energi dengan pembangunan ekonomi, PM Modi telah menjadikan

ketahanan energi sebagai salah satu prioritas utama agenda kebijakan dalam, dan luar negeri India. Sangat penting untuk kampanye “*Make in India*” yang banyak disorot oleh Pemerintah Modi untuk tujuan pembangunan. Ini sudah menjadi salah satu kebijakan luar negeri Modi, yang tercermin dalam, rekor jumlah kunjungan luar negerinya yang terkenal di mana ia telah memberikan fokus pada keamanan energi sebagai komponen penting dari perjanjian bilateral dan multilateral (Sharma, A. 2020).

Dengan adanya peningkatan konsumsi dunia terhadap energi dan semakin berkurangnya stok cadangan energi maka India sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat populasi yang tinggi, mengambil langkah – langkah guna mengamankan pasokan energinya. Berbagai upaya yang dilakukan India untuk mengamankan pasokan energi domestiknya melalui kebijakan luar negeri India yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara – negara lain terutama negara – negara penghasil energi untuk memastikan bahwa pasokan energi India tetap aman.

Untuk itu, penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan ini yaitu, mengenai upaya mencapai keamanan energi melalui peningkatan suplai minyak dari Venezuela (Asghor, 2018), yang menjelaskan bagaimana India memperkuat pasokan minyaknya dari Venezuela sebagai bagian untuk memperkuat keamanan energinya. Peningkatan suplai minyak India dari Venezuela dapat kita lihat dari peningkatan hasil aktivitas bilateral yang dilakukan oleh negara ini. Sehingga ini adalah salah satu langkah yang

dilakukan oleh India untuk memperkuat keamanan, demi mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Selain itu, pada peneliti terdahulu yaitu Rahmatul Afa (2018) menuliskan tentang kerjasama ekonomi India – Iran dalam memenuhi Keamanan Energi India Pasca – *Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA)* , yang mana pada penelitian lebih membahas bagaimana kedua negara ini terlibat dalam kerjasama ekonomi untuk menjaga keamanan energinya (Afa, 2018). Ternyata dari hasil penelusuran penulis masih sangat terbatas tulisan yang berfokus pada masalah ini, sehingga dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti masalah

Ini merupakan salah satu langkah atau tindakan nyata yang dilakukan India, agar dapat melindungi negaranya dari sebuah ancaman. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Perdana Menteri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Masalah Masalah

Isu keamanan energi (*energy security*) menjadi salah satu masalah global yang seringkali muncul dalam agenda kebijakan pemerintah di banyak negara. Hal ini disebabkan karena dampaknya dapat mengganggu keamanan suatu negara. Dalam hal ini penulis membatasi penelitian ini, dengan memfokuskan

pada kebijakan luar negeri Narendra Modi masalah upaya India dalam menyasati keamanan energi oleh pemerintahan India antara tahun 2014 – 2020 yaitu pada masa pemerintahan Narendra Modi, dengan alasan karena pada saat itu India semakin aktif dalam mengupayakan keamanan energinya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan pertanyaan yaitu:

Bagaimana kebijakan luar negeri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi (*security energy*) di India?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi (*security energy*) di India.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis, yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi tentang keamanan energi melalui penerapan kebijakan luar negerinya sebagai upaya untuk melindungi pertahanan energinya. Dalam studi

hubungan internasional sendiri, masalah keamanan energi sudah menjadi pembahasana dalam lingkup global.

2. Kegunaan praktik, yaitu penelitian yang mengangkat isu keamanan energi yang berfokus pada kebijakan luar negeri Perdana Menteri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India, dapat menjadi contoh isu yang dapat diangkat oleh mahasiswa Hubungan Internasional diluar isu politik, lingkungan, dan konflik. Sehingga dapat mengasah kemampuan mahasiwa dalam menganalisis berdasarkan sudut pandang anak Hubungan Internasional.
3. Kegunaan tambahan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam perkembangan penelitian berbasis kebijakan, khususnya mengenai upaya kebijakan luar negeri PM Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India. Sehingga hasil penelitian ini dapat didiskusikan kembali apakah isu ini benar – benar sesuai dengan perkembangan isu secara kontemporer.

D. Kerangka Konseptual

Sebagai landasan penelitian ini, maka penulis menetapkan kerangka konspetual yang mana akan membantu dalam proses menganalisa bagaimana kebijakan luar negeri PM Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India, yaitu penulis akan menggunakan konsep kebijakan luar energi dan

keamanan energi. Peneliti menganggap konsep kebijakan luar negeri dan keamanan energi tepat digunakan untuk menganalisis.

1. Konsep Keamanan Energi

Secara umum keamanan energi adalah salah satu cara suatu negara untuk mengamankan energi masa depan dengan mendapatkan sumber daya yang stabil dan berkecukupan dengan harga yang terjangkau. Keamanan energi merupakan bagian dari isu keamanan dalam studi hubungan internasional. Konsep ini dibawa ke dalam lingkup penelitian melalui proses sekuritisasi. Konsep keamanan energi yang diusulkan berasal dari krisis minyak pada tahun 1970 – an. Setelah pembentukan *International Energy Agency* (IEA) pada tahun 1974, konsep keamanan energi secara resmi diajukan.

Menurut *International Energy Agency* (IEA), keamanan energi adalah akses terhadap energi yang memadai, terjangkau serta dapat diandalkan, termasuk dalam hal ketersediaan sumber daya energi, pengurangan ketergantungan pada impor, penurunan gangguan terhadap lingkungan, persaingan dan pasar yang efisien, ketergantungan pada sumberdaya setempat yang bersih lingkungan, serta energi yang terjangkau dan adil (IEA, 2019).

Sementara menurut *Asia Pasific Energy Research Centre* (APEREC) mendefinisikan keamanan energi adalah kemampuan ekonomi suatu negara

untuk memastikan pasokan energi yang berkelanjutan pada tingkat normal yang tidak mempengaruhi kinerja ekonomi suatu negara.

Kemudian menurut Jonathan Elkind, keamanan energi bukanlah persoalan yang dapat ditangani dengan ide dan perspektif yang sekilas, tetapi membutuhkan keseimbangan ekonomi, keamanan nasional, dan lingkungan. Jonathan Elkind kemudian menggunakan beberapa *metric* sebagai kriteria keamanan. Tidak perlu memenuhi semua kriteria ini untuk menyatakan kondisi keselamatan, karena kondisi geografis dan ekonomi masing – masing negara sangat berbeda. Namun, indikator – indikator ini menjelaskan bagaimana konsep keamanan energi benar- benar cocok dengan kondisi ini. Jonathan Elkind mengusulkan empat elemen indikator keamanan energi, yaitu: 1) *Availability* (ketersediaan), 2) *Reliability* (keandalan), 3) *Affordability* (keterjangkauan), dan 4) *Sustainability* (keberlanjutan).

2. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri pada dasarnya adalah teori atau kebijakan tentang tindakan suatu negara terhadap negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri adalah rumusan dari seperangkat nilai, sikap, arah, dan tujuan untuk menjaga, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di panggung internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan dalam konteks dalam dan luar negeri, dan sekaligus menentukan tingkat keterlibatan suatu negara dalam isu – isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan membaginya menjadi dua komponen: politik dan luar negeri. Politik adalah seperangkat keputusan yang memandu tindakan, atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Policy itu sendiri berakar pada konsep pilihan (*choices*): memilih tindakan atau membuat keputusan - keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep wilayah akan membantu upaya memahami konsep luar negeri. Kedaulatan berarti kontrol atau wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara (Perwita & Yani, 2005).

Menurut Sumpena Prawirasaputra politik luar negeri ialah:

“Serangkaian kebijakan yang dilakukan suatu negara dalam mengatur hubungan luar negerinya. Ini adalah bagian dari kebijakan nasional dan sepenuhnya melayani tujuan yang telah diterapkan, terutama untuk jangka waktu tertentu sering disebut sebagai kepentingan nasional. Pada dasarnya, itu adalah pola sikap atau tanggapan terhadap lingkungan ekologisnya. Konteks respon ini berinteraksi dengan gagasan, pengalaman, sumber daya alam, dan budaya politik yang sering diekspresikan dalam falsafah negara dan dimasukkan ke dalam konstitusi” (Setiawan & Sulastri. 2017).

Sementara itu Norman Padelford dan George Lincoln menunjukkan bahwa politik luar negeri terdiri dari rencana tindakan (*course of actions*) yang digunakan oleh sebuah negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang melampaui batas – batas yuridiksinya sendiri. Lebih lanjut Padelford dan Lincoln menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah lebih dari sekedar kumpulan beberapa kebijakan khusus yang ditujukan kepada negara tertentu.

Tujuan politik luar negeri pada umumnya dipahami sebagai salah satu sasaran yang ingin dikejar oleh suatu negara dalam interaksi mereka dengan negara – negara lain. Hampir tidak ada konsesus mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai tujuan politik luar negeri dan bagaimana cara terbaik untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri. Selain itu tujuan politik luar negeri juga terus berkembang dan berbeda antara satu dengan negara yang lain. Namun menurut Padelford dan Lincoln, ada beberapa tujuan yang sifatnya mendasar dan semua berusaha mencapainya, yaitu: 1) Keamanan nasional, 2) Kemajuan ekonomi, 3) Meningkatkan kekuatan nasional, dan 4) Prestise internasional (Padelford & Lincoln, 1962).

Konsep ini akan menjadi fokus pembahasan dalam melihat keamanan energi di India sebagai isu global di pemerintahan Narendra Modi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang pada dasarnya merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti soobjektif mungkin menurut sudut pandang atau perspektif yang dipakai oleh peneliti. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis, kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Adapun hasil akhir dari tipe ini adalah memberikan gambaran mengenai sebab – akibat antara kedua variable yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulisan ini memuat penjelasan dari penemuan dan analisis terkait analisis kebijakan luar negeri India Perdana Menteri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau data yang sudah terdokumentasi dan berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Diantaranya dari laporan, telaah pustaka, buku, terbitan jurnal, website lembaga pemerintahan, serta organisasi internasional terkait topik penelitian.

3. Teknik dan Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan teknik Library Research (Studi Pustaka) dalam mengumpulkan data. Library Research adalah pengumpulan data – data dari berbagai sumber dengan cara menelusuri berbagai sumber literature,

buku, teks, buku elektronik, buku pelengkap, majalah terbitan berkala, jurnal ilmiah, bulletin, website resmi, dokumen resmi pemerintah untuk memperoleh bahan dan data sehubungan dengan topik penelitian

4. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana data yang penulis dapatkan tidak berbentuk bumerik atau data – data non matematis yang relevan dengan penelitian ini, yakni menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan melalui telaah pustaka. Kemudian penulis berusaha menyakin hasil penelitian tersebut

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan melalui rancangan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka yang berisi penelusuran kepustakaan dan literature mengenai pendapat para ahli. Sehingga dalam tinjauan pustaka akan

membahas mengenai keamanan energi (*security energy*) dan politik luar negeri (*foreign policy*)

BAB III

Bab ketiga, yaitu gambaran umum objek penelitian dimana pada bab ini akan membahas politik luar negeri pada saat kepemimpinan Narendra Modi serta menjelaskan kondisi keamanan energi di India.

BAB IV

Bab empat, yaitu pembahasan mengenai topik yang diteliti penulis. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanannya, yang akan ditinjau melalui empat aspek, yaitu: 1) *Availability* (ketersediaan), 2) *Reliability* (keandalan), 3) *Affordability* (keterjangkauan), dan 4) *Sustainability* (keberlanjutan).

BAB V

Bab kelima adalah penutup dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran – saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat mengenai objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai kebijakan luar negeri Perdana Menteri Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India memasukan literatur mengenai konsep yang akan di digunakan oleh penulis untuk menganalisis fenomena yang sedang di teliti. Adapun konsep yang akan digunakan yaitu keamanan energi (*security energy*) dan politik luar negeri (*foreign policy*)

A. Konsep Keamanan Energi

Secara umum keamanan energi adalah salah satu cara suatu negara untuk mengamankan energi masa depan dengan mendapatkan sumber daya yang stabil dan berkecukupan dengan harga yang terjangkau. Keamanan energi merupakan bagian dari isu keamanan dalam studi hubungan internasional. Konsep ini dibawa ke dalam lingkup penelitian melalui proses sekuritisasi.

Menurut Jonathan Elkind, keamanan energi bukanlah persoalan yang dapat ditangani dengan ide dan perspektif yang sekilas, tetapi membutuhkan keseimbangan ekonomi, keamanan nasional, dan lingkungan. Jonathan Elkind kemudian menggunakan beberapa metrik sebagai kriteria keamanan. Tidak perlu memenuhi semua kriteria ini untuk menyatakan kondisi keselamatan, karena kondisi geografi dan ekonomi masing – masing negara sangat berbeda. Namun,

indikator – indikator ini menjelaskan bagaimana konsep keamanan energi benar-benar cocok dengan kondisi ini.

Berdasarkan table di atas, Jonathan Elkind mengusulkan empat elemen indikator keamanan energi. Pertama yaitu *Availability* (Ketersediaan). Ketersediaan di sini dapat didefinisikan sebagai bagaimana suatu negara melindungi pemasok energinya, bersama dengan upayanya untuk melindungi saluran distribusi energinya. Dilihat dari sudut pandang nasional, elemen ini menuntut pembuat kebijakan untuk dapat menyediakan cadangan energi yang memenuhi kebutuhan jangka panjang mereka. Unsur ini melibatkan peran produsen, penjual, pembeli, distributor dan konsumen yang kemudian mendatangkan keuntungan masing-masing.

Elemen ini adalah salah satu yang paling penting dan sensitif terhadap posisinya. Penciptaan pasar energi membutuhkan sumber daya fisik, investasi modal, penerapan teknologi yang efisien, kerangka hukum dan peraturan yang tepat, produk produk yang sinkron dengan persyaratan hukum, serta penerimaan masyarakat atas layanan energi yang diberikan. Karena apabila terjadi kekacauan dalam hubungan antar partisipan dalam rantai tersebut dapat mengakibatkan kekacauan dalam hubungan pasar energi, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan situasi energi suatu negara. Potensi ancaman dalam hal ini termasuk kekurangan cadangan yang dapat dieksploitasi dengan biaya yang efektif, peluang pengembangan yang terbatas (seperti kebijakan sumber daya

nasional dan kontrak antar negara bagian), dan lingkungan keuangan, hukum, peraturan atau kebijakan yang menguntungkan untuk investasi berkelanjutan.

Kedua *Reliability* (Keandalan). Keandalan yang dimaksud ialah sejauh mana layanan energi dilindungi dari gangguan. Maksudnya ialah bebasnya pasokan dan pelayanan energi sehingga dapat sampai kepada masyarakat. Energi dalam hal ini sangat berperan penting, dikarenakan energi dibutuhkan dan menjalankan roda perekonomian serta energi juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari – hari.

Ada beberapa upaya yang dapat meningkatkan keandalan energi yaitu: 1) Diversifikasi sumber pasokan, 2) Diversifikasi rantai pasokan yang digunakan untuk memproses, mengangkut, dan mendistribusikan energi, 3) Meningkatkan kapasitas cadangan energi seperti jaringan pipa, pembangkit listrik serta sistem transmisinya, 4) Mengurangi permintaan energi (ketergantungan energi) yang dapat meringankan beban infrastruktur distribusi energi yang berlebihan, 5) Menyediakan stok atau cadangan darurat, 6) Mengembangkan infrastruktur mengenai energi, 7) Menyebarkan informasi mengenai pasar energi secara berkala.

Selanjutnya terdapat beberapa poin yang berpotensi mengancam aspek ini ialah: kegagalan sistem energi dikarenakan cuaca yang tidak kondusif, gempa bumi, kegagalan yang disebabkan oleh pemeliharaan yang lemah atau kurangnya investasi, serangan pasukan militer atau organisasi teroris, serta intervensi politik.

Ketiga *Affordability* (Keterjangkauan). Dalam hal ini isu keterjangkauan tidak hanya sekedar mempertanyakan tinggi atau rendahnya harga, tetapi juga didasarkan pada kemampuan masyarakat dan konsumen dalam mencapai harga, serta keseimbangan antara daya beli dan daya jual energi. Harga yang tidak sesuai dengan daya beli masyarakat secara tidak langsung dapat menimbulkan masalah ekonomi. Beberapa potensi ancaman dalam hal ini adalah kekurangan cadangan yang dapat dimanfaatkan dengan biaya yang efektif, permintaan yang berlebihan karena intensitas energi yang tinggi atau kegagalan untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam konsep ketahanan energi, yang mengarah pada kebutuhan akan energi, tanggapan yang lebih mendesak terhadap perubahan iklim atau ancaman lain terhadap keberlanjutan.

Keempat *Sustainability* (Keberlanjutan). Definisi energi sebelumnya tidak memasukkan pertimbangan keamanan lingkungan sebagai bagian dari ketahanan energi. Namun, definisi saat ini menekankan kelestarian lingkungan karena beberapa alasan, alasan paling kuat adalah untuk menghindari pemanasan global dan perubahan iklim dratis yang secara tidak langsung mempengaruhi cadangan minyak dunia. Pada aspek terakhir ini, potensi ancaman adalah respon kebijakan terhadap ketahanan energi dan definisi dampak perubahan iklim yang masih sempit (misalnya kenaikan permukaan air laut, gelombang badai, dan peristiwa cuaca buruk) (Pascual, C, & Elkind, J, 2010).

B. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur suatu hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri juga merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain (Sitepu, 2011).

Secara umum, politik luar negeri adalah rumusan dari seperangkat nilai, sikap, arah, dan tujuan untuk menjaga, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di panggung internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan dalam konteks dalam dan luar negeri, dan sekaligus menentukan tingkat keterlibatan suatu negara dalam isu – isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan membaginya menjadi dua komponen: politik dan luar negeri. Politik adalah seperangkat keputusan yang memandu tindakan, atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Policy itu sendiri berakar pada konsep pilihan (*choices*): memilih tindakan atau membuat keputusan - keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep wilayah akan membantu upaya memahami konsep luar negeri. Kedaulatan berarti kontrol atau wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara (Perwita & Yani, 2005).

Menurut Sumpena Prawirasaputra politik luar negeri ialah:

“Serangkaian kebijakan yang dilakukan suatu negara dalam mengatur hubungan luar negerinya. Ini adalah bagian dari kebijakan nasional dan sepenuhnya melayani tujuan yang telah diterapkan, terutama untuk jangka waktu tertentu sering disebut sebagai kepentingan nasional. Pada dasarnya, itu adalah pola sikap atau tanggapan terhadap lingkungan ekologisnya. Konteks respon ini berinteraksi dengan gagasan, pengalaman, sumber daya alam, dan budaya politik yang sering diekspresikan dalam falsafah negara dan dimasukkan ke dalam konstitusi” (Setiawan & Sulastri. 2017).

Selain itu menurut Christopher Hill mendefinisikan politik luar negeri sebagai keseluruhan dari hubungan eksternal yang resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya suatu negara, tetapi tidak eksklusif) dalam hubungan internasional. Ernest Peric secara sederhana menambahkan bahwa politik luar negeri adalah aktivitas suatu negara untuk memenuhi tujuan – tujuan dan kepentingan – kepentingannya dalam arena internasional (Bakry, 2017)

Sementara itu Norman Padelford dan George Lincoln menunjukkan bahwa politik luar negeri terdiri dari rencana tindakan (*course of actions*) yang digunakan oleh sebuah negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang melampaui batas – batas yuridiksinya sendiri. Lebih lanjut Padelford dan Lincoln menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah lebih dari sekedar kumpulan beberapa kebijakan khusus yang ditujukan kepada negara tertentu.

Tujuan politik luar negeri pada umumnya dipahami sebagai salah satu sasaran yang ingin dikejar oleh suatu negara dalam interaksi mereka dengan negara – negara lain. Hampir tidak ada konsesus mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai tujuan politik luar negeri dan bagaimana cara terbaik untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri. Selain itu tujuan politik luar negeri juga terus berkembang dan berbeda antara satu dengan negara yang lain. Namun menurut Padelford dan Lincoln, ada beberapa tujuan yang sifatnya mendasar dan semua berusaha mencapainya, yaitu: 1) Keamanan nasional, 2) Kemajuan ekonomi, 3) Meningkatkan kekuatan nasional, dan 4) Prestise internasional (Padelford & Lincoln, 1962).



BOSOWA

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Luar Negeri Perdana Menteri Narendra Modi

Secara umum kebijakan luar negeri (*foreign policy*) dapat diartikan sebagai salah satu hal yang begitu penting yang dapat mengantarkan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri juga dapat didefinisikan sebagai cara suatu negara untuk melakukan komunikasi dengan negara lain dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Narendra Damodarardas Modi merupakan Perdana Menteri India yang ke lima belas. Ia merupakan Perdana Menteri yang diusung oleh Partai Bharatiya Janata dan secara resmi dilantik pada 26 Mei 2014. Dengan pelantikannya ini, menandakan bahwa berakhirnya masa kepemimpinan Manmohan Singh dari Partai Kongres Nasional India, dengan masa waktu kepemimpinan lima belas tahun (D'Souza, 2021).

Selama tahun pertamanya menjabat sebagai Perdana Menteri, Narendra Modi telah muncul sebagai salah satu pemimpin paling dinamis di bidang kebijakan luar negeri. Dia telah menunjukkan tujuan dan semangat baru dengan partisipasinya dalam berbagai pertemuan baik itu bilateral, regional, dan multilateral. Sementara keterlibatan India dalam ranah ekonomi tetap menjadi dorongan penting dari kebijakan luar negeri Perdana Menteri

Narendra Modi, yang mana dia juga telah telah berhasil menggunakan *soft power*, seperti mempromosikan nilai – nilai demokrasi, Buddhisme, dan yoga (Brooking India, 2015).

Kebijakan luar negeri PM Narendra Modi juga disebut sebagai doktrin Modi. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan sangat jauh berbeda dengan Perdana Menteri sebelumnya. Sehingga ada beberapa perdebatan di kalangan civitas akademik mengenai kebijakan luar negerinya. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwasanya Narendra Modi secara fundamental mengubah arah kebijakan luar negeri India, akan tetapi ada sebagian orang yang tidak sepakat akan hal itu. Mereka mengatakan pergeseran pemerintahan hanya dalam gaya, akan tetapi tidak secara substansi.

Kita dapat melihat beberapa arah kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi yaitu:

1. Kebijakan *Act East*

Sejak awal Narendra Modi memimpin, ia sudah memperjelas bahwa India akan lebih fokus pada peningkatan hubungannya dengan ASEAN dan negara – negara Asia Timur lainnya, sesuai dengan kebijakan *Look East* India yang dirumuskan selama pemerintahan Narashima Rao pada tahun 1992, sebagai bentuk respon dari era baru pengembangan perekonomian, industrialisasi yang dicanangkan oleh Perdana Menteri India (Prameswaran, 2014).

Kebijakan *Look East* telah melandasi agenda kebijakan luar negeri India ke depannya dan Narendra Modi selaku Perdana Menteri bermaksud untuk menciptakan peluang yang lebih besar untuk mencapai hal ini. Dari *Look East* ke *Act East*, lebih dari *rebranding*, *act east* menyampaikan pesan mengenai keinginan India untuk memainkan peran strategis yang lebih aktif dari sebelumnya.

Kebijakan *East Act* tidak hanya ditujukan untuk mendukung perekonomian, tetapi sudah mulai meningkatkan upaya diplomasi bidang pertahanan dan keamanan, tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di Jepang dan negara tetangga seperti Asia dan Australia (Sajjanhar, 2016). Adapun tujuan dari kebijakan ini yaitu India mempunyai kepentingan nasional (*national interest*) di wilayah ASEAN. Selain itu, ASEAN mempunyai kepentingan dengan India karena India merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke tiga di wilayah Asia Selatan setelah China dan Jepang.

Penting untuk dicatat bahwa keamanan yang dimaksud Modi ialah keamanan energi, yang mana akhir – akhir ini menjadi salah satu perhatian utama India. Hal ini dikarenakan India mengalami ketergantungan pada energi yang tidak terbarukan, sehingga India membutuhkan mitra untuk dapat memastikan keamanannya.

Australia merupakan salah satu negara yang muncul sebagai mitra penting dalam konteks ini. Bahkan pada tahun 2016, untuk

mengimplementasikan visi PM tentang energi mengadakan dialog tentang *security energy*. Hubungan ekonomi dan keamanan India dengan Australia telah didukung di bawah kebijakan *Act east*. Australia juga ingin memperluas kerja sama dengan India dipandang sebagai salah satu negara paling menjanjikan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pengaruh strategis dan telah mengambil posisi utama dalam kebijakan *Look East*. Hubungan energi antara kedua negara telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan menunjukkan tanda – tanda percepatan yang lebih besar di masa depan (Hazarika & Pathak, 2019).

Tidak hanya itu saja, India juga melakukan kerjasama dengan Myanmar. Melalui *Act East*, India akan diarahkan dengan baik agar semakin terlibat dalam pembangunan kapasitas gas dan listrik domestic di Myanmar untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal serta jaringan gas di Timur laut India (Kanegoakar, S. (2020). Dari sini dapat dilihat bahwa meng India dalam hal ini memanfaatkan kebijakan *act east* untuk meningkatkan keamanan energinya melalui kerjasama dengan beberapa negara yang memiliki tingkat cadangan energi yang cukup besar.

2. Kebijakan *Neighborhood First*

Neighborhood First merupakan komponen inti dari kebijakan luar negeri Perdana Menteri Narendra Modi. Kebijakan ini bertujuan untuk

dapat fokus kembali ke negara – negara tetangga terdekat di Asia Selatan. Sebelum pelantikan atau sebelum menjadi Perdana Menteri, Narendra Modi mengisyaratkan bahwa kebijakan luar negerinya akan secara aktif fokus pada peningkatan hubungan dengan negara tetangga India yang disebut sebagai *Neighborhood First*.

Hal ini dibuktikan dengan mengundang kepala negara atau kepala pemerintahan Asia Selatan untuk menghadiri upacara pelantikannya. Yang mana saat ini dia meyakinkan negara – negara tetangga bahwa India akan terus memprioritaskan hubungan dengan mereka (Haran, 2017).

Selain itu, Narendra Modi juga menekankan bahwa pentingnya lingkungan India dalam stabilitas politik, kemajuan dan perdamaian di kawasan bagi pertumbuhan dan perkembangan Asia Selatan, serta berjanji bahwa pemerintah akan melakukan hubungan persahabatan dengan negara – negara tetangga serta bekerja sama untuk memperkuat forum – forum regional, salah satunya SAARC.

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan politik delapan negara di kawasan Asia Selatan, yang didirikan pada tahun 1985. Adapun anggota dari SAARC yaitu: Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Srilangka. Adapun Afghanistan baru bergabung sebagai anggota SAARC kedelapan pada tahun 2007.

Kerjasama dalam SAARC didasarkan pada penghormatan terhadap lima prinsip yaitu: kesetaraan, kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan politik, tidak campur tangan dalam urusan internal negara – negara anggota, dan saling menguntungkan (Argaditya, 2021).

Perlu diketahui, bahwa pada awal masa pemerintahan Narendra Modi, ia menempuh jalur bilateral dan regional. Pada seratus hari masa pemerintahannya, dia mengunjungi Nepal, Bangladesh, dan Bhutan yang mana ia mendorong untuk menghidupkan kembali hubungan bilateral dengan negara – negara tetangga salah satunya di bidang energi (Brooking India, 2015).

Pada bidang energi India memainkan peran kunci dalam menciptakan arsitektur keamanan energi baru untuk negara tetanggannya, mulai dari perdagangan listrik yang lintas batas hingga memasok minyak bumi. Ini dibuktikan dengan pendirian terminal gas alam cair (LNG) di Sri Lanka yang merupakan bagian integral dari strategi ini, juga membantu memberikan pengaruh ekonomi. Sri Lanka telah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan terminal LNG (*Liquefied Natural Gas*) di dekat Kolombo dengan perusahaan India dan Jepang. Kedua negara dalam upaya mempererat hubungannya, telah membahas mengenai masalah ini sejak satu tahun terakhir. Pemerintah Sri Lanka mengeluarkan *Letter of Intent* kepada

pemerintah India selama kunjungan Menteri Luar Negeri ke Kolombo (Livemint, 2017)

Selain itu negara utara India (Nepa) memiliki potensi tenaga air yang sangat besar. Menjajaki perdagangan listrik lintas batas antara negara – negara di Asia Selatan dengan mengembangkan pasar yang kompetitif, akan membantu India untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringannya juga memenuhi kebutuhan listrik melalui sumber yang bersih.

Selain membangun proyek pembangkit listrik di Bhutan, Nepal dan Bangladesh, India juga telah memiliki jaringan listrik dengan Bhutan, Nepal, Bangladesh, dan berencana untuk mengembangkan jaringan transisi energi listrik dengan Myanmar dan Sri Lanka (News18, 2022)

B. Kondisi Keamanan Energi di India

India merupakan salah satu negara berkembang yang semakin bergantung pada energi. Keamanan energi tidak hanya menjadi agenda global utama tetapi telah muncul sebagai integral dari kemitraan strategis India dengan banyak negara. Sebagai salah satu konsumen energi terbesar, India rentan karena ketergantungan yang tinggi pada impor energi. Menyadari kerentanan ini, India memasukkan keamanan energi dalam agenda kebijakan luar negerinya. Ini mendiversifikasi keterlibatan energinya dengan mengkonsolidasikan hubungan

dengan negara – negara pengekspor gas minyak dan mengubah integritas energinya (Anas, 2013)

Ada banyak pelaku yang terlibat dalam keamanan energi yaitu meliputi pihak swasta dan internasional. Keamanan energi memainkan peran penting dalam menentukan prioritas dan hubungan kebijakan luar negeri India dengan negara – negara di berbagai benua. Mengingat meningkatnya permintaan energi di masa mendatang dari berbagai sumber dan konsumen, hubungan energi global dan regional akan mengalami persaingan yang lebih ketat dan diplomasi energi yang proaktif di antara negara- negara.

India adalah negara yang mengalami kekurangan energi dan kemungkinan akan mengalami hal itu dalam waktu yang lumayan lama. Pasokan energinya dari sumber negeri tidak hanya besar tetapi sangat terkonsentrasi di beberapa negara. Dari perspektif keamanan energi, penting bahwa semua upaya perlu dilakukan untuk memperkuat hubungan dengan pemasok utama, yang sama pentingnya adalah mendiversifikasi sumber pasokan. Terlebih lagi dengan berubahnya bauran energi, sudah saatnya keterlibatan energi didefinisikan pada skala yang lebih luas.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan, pemerintah India telah melakukan banyak inisiatif untuk terlibat dengan negara- negara yang kaya akan energi. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) telah membuka banyak program tentang keterlibatan terkait energi dengan semua pemangku kepentingan dan pemain termasuk IEF yang berbasis di Riyadh, *International Partnership for Energy*

Efficiency Cooperation (IPEEC) dan IRENA (*Energy Security and India's Foreign Policy*). (Anas, 2013)

Bauran energi India terdiri dari sumber energi tak terbarukan (batubara, lignit, minyak bumi, dan gas alam) dan energi terbarukan (angina, surya, hidro, biomassa, ampas tebu, dll). Cadangan sumber energi tak terbarukan India seperti batu bara, lignit, minyak bumi, gas alam dan potensi pembangkit sumber energi terbarukan telah meningkat dari waktu ke waktu. Dalam *BP's Statistical Review of World Energy* (2020), mengatakan bahwa cadangan batu bara India mencapai 111,05 miliar ton (10,3 persen dari cadangan dunia) (Anwar, 2022).

Pasokan batu bara India telah meningkat sejak awal tahun 2000 – an, dan batu bara terus menjadi sumber pasokan energi dan pembangkit listrik domestik terbesar. Di tengah peraturan perihal polusi udara yang lebih ketat, pembangkit listrik tenaga batu bara yang lebih efisien, fleksibel, dan relative rendah emisinya akan diposisikan lebih baik karena kelayakan ekonominya. Pemerintah sedang mengidentifikasi pabrik – pabrik yang dapat dan perlu berjalan lebih fleksibel dalam sistem.

India adalah konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, penyulingan minyak terbesar keempat dan pengeksport bersih produk olahan. Laju pertumbuhan konsumsi minyak India yang diperkirakan akan melampaui China pada pertengahan tahun 2020 – an, menjadikan India sebagai pasar yang sangat menarik untuk investasi. Untuk mempertahankan posisi India sebagai pusat

penyulingan, pemerintah sedang mengejar peta jalan jangka panjang yang sangat ambisius untuk memperluas kapasitas penyulingannya sejalan dengan proyeksi pertumbuhan permintaan negara hingga tahun 2040. Karena cadangan minyak terbukti terbatas dibandingkan dengan kebutuhan domestic. Ketergantungan impor India pada tahun 2018 akan meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang (IEA, 2020).

Untuk meningkatkan ketahanan minyak, pemerintah memprioritaskan pengurangan impor minyak, peningkatan kegiatan hulu domestic, diversifikasi sumber pasokan dan peningkatan investasi India di ladang minyak luar negeri di Timur Tengah dan Afrika. India mempromosikan kebijakan produksi dalam negeri yaitu mengenai kebijakan eksplorasi dan perizinan hidrokarbon (HELP), dan secara bertahap membangun cadangan minyak darurat khusus.

Cadangan minyak bumi strategis India melingkupi penyimpanan komersial yang tersedia di pabrik. Kapasitas cadangan strategis India saat ini sebesar 40 juta barel dapat menutupi lebih dari 10 hari impor bersih saat ini. Namun mengingat pertumbuhan konsumsi minyak yang diharapkan, volume yang sama mungkin hanya mencakup empat hari impor pada tahun 2040. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengejar fase kedua dari kebijakan penyimpanan saham strategisnya, yang akan menambah tambahan 50 juta barel dan juga mempersiapkan fase – fase selanjutnya.

Pada tahun 2030 nanti pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pangsa gas alam dalam bauran energi menjadi 12 persen. Meningkatkan produksi gas alam dalam negeri telah menjadi prioritas utama pemerintah, karena output secara tak terduga berada di bawah tingkat perkiraan selama beberapa tahun terakhir. India memiliki lima terminal operasi gas alam cair. Proyek yang sedang dibangun dapat menghasilkan hingga 11 terminal tambahan selama tujuh tahun kedepan.

Peran gas alam telah tumbuh di sektor perumahan dan transportasi India, akan tetapi turun di pembangkit listrik. Dimana gas alam yang diimpor tetap terhimpit oleh energi terbarukan dan batu bara yang murah. Pemerintah berkomitmen untuk lebih meliberalisasi pasar gas alam negara tersebut. Penguatan pengawasan regulasi kegiatan hulu, tengah dan hilir harus menjadi bagian dari reformasi pasar, karena kemungkinan akan membawa efisiensi yang lebih besar dan mendorong permintaan gas dan investasi dalam infrastruktur transportasi gas. Pasar gas domestic yang cair dan berfungsi dengan baik akan menjadi pilar kuat bagi keamanan pasokan gas India.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan seperti apa kebijakan luar negeri Menteri Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India pada tahun 2014 – 2020. Sesuai dengan penjelasan di bab dua tentang kerangka teoritis, maka penjelasan bab ini akan menggunakan konsep politik luar negeri menurut Norman Padeford dan George Lincoln, yang mana mengusulkan empat elemen indikator untuk menilai sebuah politik luar negeri ini, yaitu:

A. Keamanan Nasional

Keamanan nasional pada dasarnya mengacu pada kebijakan publik, yang mana untuk memastikan keamanan nasional melalui penggunaan kekuatan ekonomi dan militer serta penjajahan diplomatik baik secara damai ataupun perang. Untuk mencapai keamanan nasional suatu negara harus memiliki ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan, ketahanan energi, dan lain sebagainya. Keamanan nasional dalam bidang energi sangatlah penting. Hal ini dikarenakan, jika keamanan energi tidak terpenuhi maka tentunya itu akan mempengaruhi keamanan nasionalnya.

Dalam hal ini, tentu keamanan energi rentan mempengaruhi keamanan nasionalnya. Misalnya dapat kita lihat dari pesatnya perkembangan yang dialami India berimbas pada bertambahnya keperluan sumber daya yang mesti dicukupi.

Menurut International Energy Agency (IEA), kebutuhan energi di dunia akan terus mengalami peningkatan, salah satunya ialah India (IEA, 2019).

India dalam hal ini, merupakan negara yang semakin bergantung pada energi. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi ini dapat berimplikasi pada munculnya krisis akan energi. Krisis tersebut memunculkan dampak yang tidak dapat dielakkan, sehingga ini berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional India itu sendiri, yang mana sesuai dengan kebijakan Internationa Energy Agency (IEA) pada tahun 2018, diperkirakan permintaan energi India akan meningkat lebih dari dua kali lipat (IEA, 2020).

Oleh karena itu, India dapat melihat melalui kebijakan Narendra Modi bahwa pada tahun 2015, India mengajukan proposal untuk menjadi anggota penuh Shanghai Cooperation Organization, sehingga India resmi bergabung dengan Shanghai Cooperation Organization pada tahun 2017. Ini adalah salah satu langkah yang dilakukan India untuk meningkatkan keanggotaannya. Energi menjadi alasan utama India mengubah keanggotaannya. Oleh karena itu, energi ini menjadi salah satu motivasi untuk mengubah keanggotaan penuh SCO dan mencoba menggunakan perangkat organisasi regional untuk mencapai manfaat dan kepentingan. Kehadiran organisasi regional SCO juga mempromosikan kepentingan energi antara India dan negara-negara kawasan Asia Tengah. Organisasi Kerjasama Shanghai telah membentuk kelompok yang disebut *SCO Energy Club*, yang disusun sebagai kelompok interaktif untuk mengurus kepentingan negara-negara anggota di bidang energi

Hal ini juga yang mendorong India untuk lebih melakukan penguatan hubungan dagang dan investasi infrastruktur energi di kawasan Asia Tengah yang menjadi bahan eksplorasi baru bagi kekuatan energi India. Sehingga melalui ini dapat kita lihat bahwa kebijakan Narendra Modi *Neighborhood First* sudah cukup efektif sehingga melalui kerjasama yang diadakan oleh negara-negara di kawasan dapat menjaga keamanan nasionalnya serta melalui ini juga keamanan energi di India dapat meningkat dikarenakan pasokan energi yang memadai serta terjangkau (Yudhistira, 2019).

B. Kemajuan Ekonomi

Pada kondisi ini, Energi merupakan salah satu kebutuhan vital bagi sebuah negara. Setiap negara membutuhkan energi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian dan menjadi salah satu sumber daya yang sering diperebutkan karena memiliki daya strategis dan memiliki persebaran sumber daya yang tidak merata, sehingga menyebabkan negara harus menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya.

India merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kisaran 7 persen dalam lima tahun terakhir (Laoli, 2019). Ini selaras dengan permintaan energi yang begitu tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Kumar pada tahun 2017 bahwa hubungan kausalitas yang terjadi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi energi (Nandakumar, dkk, 2017).

Ketersediaan energi sangatlah dibutuhkan. Ini didukung oleh permintaan energi di India meningkat pesat dari tahun ke tahun, yang mana India telah membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi sejak tahun 2000. India menghasilkan pencegahan penggunaan energi sebesar 15 persen lebih banyak pada tahun 2018, yang mana pada sektor industri dan jasa menyediakan sumber penghemat energi terbesar. Akan tetapi peningkatan efisiensi ini sangatlah dipengaruhi oleh dampak aktivitas manusia yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan standar hidup, serta permintaan layanan energi yang lebih dari dua kali lipat penggunaan energi India pada tahun 2000 dan 2018.

Sesuai dengan kebijakan IEA pada tahun 2018, yang memperkirakan permintaan energi India akan mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat hingga tahun 2040. Sementara permintaan listrik dapat meningkat tiga kali lipat dengan kebijakan yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan India akan energi cukup tinggi (IEA, 2020).

Sehingga dalam hal ini, India mempunyai peluang yang signifikan untuk meningkatkan ekonominya melalui peningkatan ambisi kebijakan dan program efisiensi energinya. Efisiensi energi dapat memainkan peran kunci yang mana tidak hanya mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi. Akan tetapi, seiring pertumbuhan India yang pesat, terdapat pula peluang yang signifikan untuk lebih meningkatkan ambisi kebijakan untuk melindungi pasokan energinya sehingga efisiensi energi ini dapat memainkan peran kunci.

Untuk itu, agar dapat meningkatkan ekonominya maka India melindungi pasokan energinya, sesuai dengan kebijakan Narendra Modi Act East, maka India melakukan kerjasama dengan negara – negara ASEAN agar dapat memastikan pasokan energinya tetap tersedia. Salah satunya yaitu India melakukan kerjasama dengan negara – negara penghasil batu baa, misalnya Indonesia. Hal ini dikarenakan India memang sangat bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energinya dan dapat meningkatkan roda perekonomiannya. Sehingga ketika pola pertumbuhan ekonomi yang massif maka akan membutuhkan energi yang begitu besar sehingga terjadi penggunaan energi sebagai penggerak komoditas ekonomi nasional di India.

C. Meningkatkan Kekuatan Nasional

Meningkatkan kekuatan nasional yang dimaksud dalam ha ini ialah, ketika India mempunyai pertahanan energi yang kuat tentu itu akan berdampak pada peningkatan kekuatan nasionalnya baik dari segi militer, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Peningkatan kekuatan nasional ini dapat kita lihat dari segi keandalan energi yang dimiliki oleh India.

Keandalan energi yang dimaksud di sini ialah bebasnya pasokan pelayanan energi sehingga dapat sampai kepada masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan India yang memiliki sumber pembangkit listrik mulai konvensional seperti batu bara, lignit, gas alam, minyak, tenaga air, dan nuklir hingga sumber non – konvensional yang layak seperti angin, matahari, pertanian dan domestik.

Permintaan listrik telah meningkat pesat dan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut di tahun – tahun mendatang. Untuk memastikan kebutuhan listrik yang terus meningkat, diperlukan penambahan kapasitas pembangkit yang ada secara besar – besaran yang tidak lain bertujuan untuk peningkatan kekuatan nasional India itu sendiri. Upaya untuk meningkatkan keandalan energi India yaitu diversifikasi sumber energi pasokan, diversifikasi rantai pasokan yang digunakan untuk memproses, mengangkut, dan mendistribusikan energi, meningkatkan kapasitas cadangan energi seperti jaringan pipa, pembangkit listrik serta transmisinya, mengurangi permintaan energi, menyediakan stok atau cadangan darurat, mengembangkan infrastruktur, dan menyebarkan informasi mengenai pasar energi (Aggarwal, 2017).

Selain daripada itu, cadangan bahan bakar fosil yang aman diasumsikan terdiri dari cadangan domestik, cadangan internasional yang dimiliki oleh perusahaan India terkait dengan infrastruktur. Ekplorasi yang tidak memadai dikombinasikan dengan meningkatnya permintaan, yang mana telah menyebabkan penurunan cadangan bahan bakar fosil. Untuk meningkatkan keamanan energi India yang akan berdampak pada kekuatan nasionalnya, maka India telah mengkuisisi saham aset internasional akan tetapi belum menumbuhkan cadangan domestik dengan kecepatan yang sepadan.

Perkembangan cadangan domestik yang lambat sementara permintaan energi meningkat pesat telah mendorong impor energi India. India mengimpor 70 persen dari permintaan minyaknya dan 80 persen impor gas, dan India juga

mengimpor sepertiga dari kebutuhan gasnya. Hal utama yang harus dipastikan oleh India yaitu agar menyediakan cadangan energi yang sekiranya dapat memenuhi stok untuk waktu yang cukup lama. Ditambah dengan kondisi saat ini, yaitu stok batu bara saat ini sangat berkurang, sehingga India harus mengambil langkah untuk beralih energi yang lebih bersih.

Selain itu juga, India berusaha untuk mengurangi ketergantungan impor energinya dan lebih memilih untuk meningkatkan energi bersih. Karena pada dasarnya India memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi mengenai masalah impor. Semua ini diusung agar energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari – hari dapat terjangkau dalam waktu yang lama.

Sehingga ada berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, untuk meningkatkan keandalan energi, yaitu: peningkatan produksi yang berkelanjutan oleh sektor publik, lelang batu bara, dan masuknya pelaku swasta di pertambangan batu bara, serta penurunan permintaan batu bara dalam sektor ketenagalistrikan akan membantu mengurangi ketergantungan impor terhadap batu bara (Sustainable Energy, 2016).

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh India, maka penulis melihat bahwa India mengambil langkah yang cukup baik dalam meningkatkan produksi yang berkelanjutan, sehingga India tidak terlalu bergantung pada energi konvensional lagi. Upaya ini dilakukan agar India dapat mandiri dan tidak begitu tergantung pada bahan bakar fosil. Akan tetapi ternyata India masih cukup sulit untuk melepas ketergantungan ini. Adapun alasan mengapa India masih cukup sulit

untuk melepas ketergantungan itu, karena kembali lagi semua itu dilakukan demi tercapainya kekuatan nasionalnya. Segala sektor sangat membutuhkan yang namanya energi, sehingga India sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat secara tidak langsung membutuhkan banyak energi untuk di berbagai sektor. Sehingga untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya maka India harus melakukan kerjasama. Bagimanapun penyongsong utama energi di India berasal dari bahan bakar fosil sehingga impor dari negara – negara tetangga masih sangat di butuhkan dalam meningkatkan kebutuhan energi di India.

D. Prestise Internasional

Prestise internasional yang dimaksud dalam hal ini yaitu bagaimana dunia melihat ternyata mampu untuk mengelola keamanan energinya, mampu mempertahankan keamanan energinya di mata international. Sehingga ini tidaknegara – negara lain tidak akan memandang remeh India, bahkan negara – negara lain akan berlomba – lomba melakukan kerjasama dengan India.

Diketahui bahwa India dan China berbondong – bonding untuk melakukan adu kekuatan dalam hal masalah energi di kawasan, apalagi pada saat ini India merupakan yang sudah cukup mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terutama dapat kita lihat dari kebijakan Narendra Modi tentang berfokus pada negara tetangga. Salah satu upaya India untuk mendapatkan prestise internasional yaitu dengan melakukan peningkatan energi dari segi keberlanjutan.

Adapun yang dimaksud keberlanjutan dalam hal ini ialah memasukkan pertimbangan keamanan lingkungan sebagai bagian dari ketahanan energi. Ini menjadi prioritas utama bagi India saat ini. Karena diketahui bahwa India adalah salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China (Timperley, 2019). India mengeluarkan sekitar 3 gigaton CO₂ gas rumah kaca setiap tahun, serta sekitar dua setengah ton per orang, yang mana merupakan dari rata – rata dunia (USAID, 2018). Sehingga India harus segera mengambil langkah agar lingkungan tidak mengalami kerusakan yang berkepanjangan akibat peningkatan emisi gas rumah kaca.

Sejauh ini India merupakan salah satu negara yang aktif dalam forum internasional dalam memerangi perubahan iklim. India telah mengambil langkah – langkah signifikan untuk meningkatkan efisiensi energi, yang telah menghindari tambahan sebesar 10 persen dari permintaan energi tahun. Dan 300 juta ton emisi CO₂ selama periode 2000 – 2018.

Menurut analisis IEA pada tahun 2020, bahwa pada tahun 2018 investasi India PV Surya lebih besar daripada di semua sumber bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. India juga telah mengerahkan total 84 GW kapasitas listrik terbarukan yang terhubung ke jaringan. Sebagai perbandingan, total kapasitas pembangkit listrik India mencapai 366 GW pada tahun 2019. India membuat kemajuan menuju target 175 GW energi terbarukan pada tahun 2022.

Kebijakan energi terbarukan dan investasi India telah mengumpulkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, energi terbarukan

di India kemungkinan akan memainkan peran yang begitu penting dalam mengatasi masalah keamanan energi dan menawarkan manfaat ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang. Revolusi energi hijau di India dapat meningkatkan standar hidup di sektor domestik (Nandy, 2016).

India bertekad untuk mencapai target 275 GW pada tahun 2027, dan 597 hingga 710 GW pada tahun 2040. Ini tentu akan mengubah bauran energi, serta memberikan tindakan kebijakan yang cerdas pada pembangkitan, penetapan harga, transmisi, dan distribusi. NITI Aayog memproyeksikan bahwa pada tahun 2040, pasar energi India akan sepenuhnya berkembang dengan peningkatan pasokan untuk memenuhi permintaan berdasarkan pasar yang kompetitif (Draf Kebijakan Energi Nasional, 2017). Komitmen India terhadap sumber energi bersih dan rendah karbon dipimpin oleh tenaga surya dan angin. Energi surya sebagai inti dari dorongan India menuju sumber energi rendah karbon.

Maka berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwa memang kebijakan Narendra dapat meningkatkan prestise internasional terkhususnya fokus pada masalah energi terbarukan di India. Karena diketahui India memiliki potensi yang signifikan untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan energi terbarukan. Bahkan india juga dapat memimpin dalam upaya transformasi energi baik secara regional maupun global melalui energi terbarukan ini. Hal ini juga dapat dilihat melalui kebijakan yang diambil oleh Narendra Modi khususnya untuk negara – negara tetangga seperti Nepal yang memiliki potensi tenaga air 83 Gw akan membantu India dalam mengoptimalkan kebutuhan energinya melalui

sumber energi yang bersih. Sehingga merupakan salah satu langkah yang tepat untuk pengambilan kebijakan Narendra Modi dalam menangani masalah energi di india.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian, maka pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada temuan hasil yang ada pada bab sebelumnya. Yang mana secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 4 indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India berjalan cukup efektif.

1. Berdasarkan kebijakan *International Energy Agency* (IEA) tahun 2018, diperkirakan permintaan energi India akan meningkat lebih dari dua kali lipat hingga tahun 2040. Ini dikarenakan India memiliki tingkat permintaan energi yang tinggi dan tingkat kebutuhan energi di India cukup tinggi. Sehingga berdasarkan kebijakan luar negeri Menteri Narendra Modi *Act East* dan *Neighborhood First* untuk mengatasi hal ini India mengambil langkah untuk melakukan kerja sama dengan negara – negara tetangga agar dapat menjamin pasokan energi India dalam waktu yang serta dapat meningkatkan keamanan energi India
2. India sudah melirik masalah keamanan energi dari segi *sustainability* dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang mana

merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan keamanan energi di India. Energi terbarukan menjadi salah satu penyongsong utama dalam meningkatkan keamanan energi. Bahkan Narendra Modi selaku perdana Menteri mengatakan bahwa India telah berkomitmen untuk mencapai target 175 GW energi terbarukan pada tahun 2022. India memiliki potensi yang begitu besar dalam menjalankan energi terbarukan bahkan India dapat memimpin dalam upaya transformasi energi terbarukan secara global.

B. Saran

1. Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Narendra Modi dalam upaya meningkatkan keamanan energi di India berjalan dengan cukup efektif, yang mana ditandai dengan upaya India melirik masalah energinya dari segi ketersediaan, keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu penulis memberikan saran agar setiap negara dapat mengetahui keunggulan yang mereka miliki terkhususnya di masalah energi terbarukan, sehingga dapat meningkatkan keamanan energinya.
2. Penelitian ini diakui masih memiliki banyak kekurangan dari segi analisis data, sehingga peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat mengakat isu keamanan energi dengan referensi data yang lebih baik lagi.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penstudi HI dalam mengangkat isu – isu penelitian diluar dari pembahasan seputar konflik,

gender, dengan melihat isu keamanan dan lingkungan dapat diangkat dalam HI.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Nuansa Cendekia, Bandung, hal 194
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana. Hal 155-156
- Holsti, K. J. (1970). *International Politics, A Framework for Analysis*. London. Hal. 116
- Padelford, N & George A. L. (1957). *International Politics: Foundations of International Relations*. London: Routledge. Hal
- Pascual, C., & Elkind, J. (Eds.). (2010). *Energy security: economics, politics, strategies, and implications*. Brookings Institution Press. Hal.122
- Pascual, C., & Elkind, J. (Eds.). (2010). *Energy security: economics, politics, strategies, and implications*. Brookings Institution Press. Hal.121-130
- Perwita, A.G.B.& Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 47 – 48.
- Sitepu, P. A. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 177 – 178.

Setiawan, A & Endang, S. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. UMJ Press.

Hal 4

Sharma, A. (2019). *India's Pursuit of Energy Security: Domestic Measures, Foreign Policy and Geopolitics*. SAGE Publications India.hal.28

JURNAL

Aufa, R. (2018). *Kerjasama Ekonomi India-Iran dalam Memenuhi Keamanan Energi India Pasca-Joint Comprehensive Plan Of Action (Jcpoa)* (Doctoral dissertation).

BP. (2019). *BP Statistical Review of World Energy*. Edt 65. Hal 8

Breuning, M. (2007). *Foreign policy analysis: A comparative introduction*. Springer.
Hal.5

Dugis, V. (2007). *Analysing foreign policy*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,
20(2), 1.

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Analysing%20Foreign%20Policy.pdf>

Government of India. (2018). *Indian Potroleum & Natural Gas Statistic 2017 -18*.

Hal 11

Hazarika, O. B., & Pathak, S. (2019). *Energy Security Dynamics in India–Australia Relations*. *Jadavpur Journal of International Relations*, 23(1), 32

IEA. (2020). *India 2020 Energy Policy Review*. International Agency Energy, 15

- Mas'ood, M & Riza, N. A. (2005). *Energi dan Minyak Bumi dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hal 4.
- Nandakumar, V.T. dkk (2017). Interaction Between Energy Consumption and Economic Growth in India. *International Journal of Research Granthaalayah*.
https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG17_A04_208. Diakses 22 April 2022
- Pradhan, S. K. (2020). *India's Quest for Energy Through Oil and Natural Gas*. Springer Singapore.
- Pradnyana, G. (2016). Pemenuhan kebutuhan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, Vol 5. No. 2,68.
- Sustainable Energy Foundation. (2016). *An Energy Security Index For India*.
[https://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2017/06/McKinsey-2016-India-Energy-Security -Index.pdf](https://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2017/06/McKinsey-2016-India-Energy-Security-Index.pdf). Diakses 13 Februari 2022
- Yudhistira, A. R. (2019). *Motif Energy Security India Dalam Melakukan Perubahan Status Keanggotaan di Shanghai Cooperation Organization Dari Observer Menjadi Full Member Pada 2005 – 2017?*
<https://repository.unair.ac.id/87521/5/Jurnal%20Perpustakaan%20Aditya%20Rangga%20Y.%20071511233080.pdf>. Diakses 20 Maret 2022

WEBSITE

Aggarwai, V. (2017). *Why India Needs to Further Diversify Its Energy Basket*.

<https://energy.economictimes.indiatimes.com/energy-speak/why-india-needs-to-further-diversify-its-energy-basket/2181>. Diakses 13 Februari 2022

Anwar, M. C. (2022). Daftar Negara yang Memiliki Cadangan Batu Bara Terbesar di

Dunia. https://money.kompas.com/read/2022/01/02/092551726/daftar-negara-yang-memiliki-cadangan-batu-bara-terbesar-di-dunia?page=all&jxconn=1*v10um2*other_jxampid*YmFsN2Y1WXFjcVc1MndUYjZGVUxHLTIWVTRrZ2dDTDNsTzFQTGRXT04wamY4SHdlejc1WVZ1OVREUjB5Ymt0ag..#page2. Diakses 11 Februari 2022

Argaditya, R. (2021). *Peran Nepal dalam South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)*.

<https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/79?title=Peran+Nepal+dalam+South+Asian+Association+for+Regional+Cooperation+%28SAARC%29>. Diakses 11 Februari 2022

Chodhary, S. (2021). India's Oil Demand To Rise 50% By 2030 Against Global Expansion of 7%: Report.

<https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/indias-oil-demand-to-rise-50-by-2030-against-global-expansion-of-7-report/articleshow/86987508.cms>. Diakses 05 Februari 2022

D'Souza, S. M. (2021). *Narendra Modi*.

<https://www.britannica.com/biography/Narendra-Modi>. Accessed 12 February 2022.

Government of India. (2020). *Coal – Indian Energy Choice*.

<https://coal.nic.in/en/major-statistics/coal-indian-energy-choice>. Diakses 12 Februari 2022

Haran, Amb. (Retd). V. P. (2017). *Challenges in India's Neighbourhood Policy*.

<https://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?674>. Diakses 11 Februari 2022.

IEA. (2019). *Energy Security*. <https://www.iea.org/topics/energy-security>. Diakses 02

Februari 2022.

Jaganmohan, M. (2021). Natural Gas Production Volume India FY 2012 – 2021.

<https://www.statista.com/statistics/666982/india-natural-gas-production-volume/#:~:text=In%20financial%20year%202019%2C%20the,end%20of%20fiscal%20year%202020..> Diakses 0 Februari 2022.

Kanegoakar, S. (2020). Energy Security and India's Growing Ties With Myanmar.

<https://www.indiaglobalbusiness.com/amp/story/guestcolumns/insight/energy-security-and-indias-growing-ties-with-myanmar>. Diakses 11 Februari 2022

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2008). Hingga 2030, Permintaan

Energi Dunia Meningkatkan 45%. <https://www.esdm.go.id/id/media->

[center/arsip-berita/hingga-2030-permintaan-energi-dunia-meningkat-45-#:~:text=Kebutuhan%20energi%20dunia%20terus%20mengalami,1%2C6%25%20per%20tahun..](#) Diakses 05 Februari 2022.

Laoli, N. (2019). Survei Pemerintah: Pertumbuhan Ekonomi India Mencapai 7% Tahun Fiskal Berikutnya. <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-pemerintah-pertumbuhan-ekonomi-india-mencapai-7-tahun-fiskal-berikutnya>. Diakses 05 Februari 2022.

Mishra, A. R. (2021). India To Be 3rd Largest Imported by 2050: UK Report. <https://www.hindustantimes.com/business/india-to-be-third-largest-importer-by-50-uk-report-101632074169695.html>. Diakses 05 Februari 2022.

Prameswaran, P (2014). *Modi Unveils India's 'Act East Policy' to ASEAN in Myanmar*. <https://thediplomat.com/2014/11/modi-unveils-indias-act-east-policy-to-asean-in-myanmar/>. Diakses 11 Januari

The World Bank. (2020). *GDP Growth (annual %)*. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&most_recent_year_desc=false&start=1969. Diakses 07 Januari 2022

Tiwary, Shivangi. (2022). Oil & Gas. <https://www.investindia.gov.in/sector/oil-gas>. Diakses 05 Februari 2022.

Sajjanhar, A. (2016). Taking Stock of India's Act Policy. <https://www.orfonline.org/wp->

content/uploads/2016/05/ORF_Issue_Brief_142_A_Sajjanhar.pdf. Diakses

11 Februari 2022.

Sharma, A. (2020). India's Quest for Energy Security.

<https://www.dailypioneer.com/2020/sunday-edition/india---s-quest-for-energy-security.html#:~:text=In%20the%20past%2C%20India's%20energy,mainly%20aimed%20at%20managing%20supply.&text=India%2C%20with%2017%25%20of%20the,the%20country's%20primary%20energy%20use>. Diakses

07 Februari 2022.

Timperley, J. (2019). *The Carbon Brief Profile : India*.

<https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-india>. Diakses 13

Februari 2022

USAID (2018). *Greenhouse Gas Emissions in India*.

<https://www.climatelinks.org/resources/greenhouse-gas-emissions-factsheet-india>. Diakses 13 Februari 2022.